

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Helmi, Fauzi Syam, Fitria, Latifah Amir, Ratna Dewi, dan Melia Rizki Ruswandi.

“BUKU AJAR HUKUM PERADILAN TATA USAHA NEGARA,” 2025.

Imran, Fadil. *DASAR – DASAR ILMU HUKUM*, 2024.

Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, 2004.

Isretno, Evita. *HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Pengantar Kajian Tentang Kewenangan & Kebijakan Pemerintah*, 2020.

Mitita, Siruang. “Tinjauan Yuridis Hak Uji Materiil Peraturan Daerah Terhadap Undang-Undang Oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.” *Lex Administratum VII*, no. 3 (2019): 5–12.

Methasari, Melanny. “Efektifitas Manajemen Piutang Dalam Upaya Meningkatkan Modal Kerja Pada Pt.Bpr Aridha Arta Nugraha.” *CV. Mitra Sumber Rejeki*, 2021.

Mujiburohman, Dian Aries. *Buku Ajar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, 2022.

Nugraha Safri. *Hukum Administrasi Negara*, 2007.

Nugraha, Safri. “PERENCANAAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

(PPHN) BIDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA,” 2006.

Ridwan HR. “Hukum Administrasi Negara.” *Jakarta: Rajawali Pers*, 2018, 94–102.

Rohman, Abdul. “HUKUM ADMINISTRASI NEGARA,” 2022.

Rohman, Abdul. “HUKUM ADMINISTRASI NEGARA,” 2022.

Subagiyo, Dwi Tatak. *HUKUM JAMINAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG JAMINAN FIDUSIA (Suatu Pengantar)*, 2018.

Susiani, Dina. *PENGANTAR HUKUM ADMINISTRASI NEGARA*, 2024.

Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, 2024.

## **JURNAL**

Al, Hakim Lukmanul Soetijono Rachmad Iwan Khanif. “Penerapan Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum Dalam Permohonan Uji Materiil Di Mahkamah Agung Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum Merupakan Salah Digunakan . Metodologi Penelitian Dapat Didefinisikan Merupakan Suatu Cabang.” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu* 3, no. 1 (2024): 1–6.

Arifianto, Muhamad. “Kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara Ditinjau Dari Teori Sistem Hukum” 1, no. 1 (2022).  
<https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i1.1748>.

Bariang, Novida Helen, Dani Sintara, Halimatul Maryani, dan Adawiyah Nasution.

“Pengurusan Piutang Negara Pada Kementerian/Lembaga Dalam Perspektif Hukum Perdata (Studi Pada KPKNL Medan)” 9, no. 240 (2022): 112–20.

Bimasakti, Muhammad Adiguna. “Batasan Tindakan Dalam Hukum Administrasi Pemerintahan Dan Perbuatan Dalam Hukum Perdata Oleh Pemerintah,” 2025.

Christopher, Rasji, Howard Kevin, dan Rukmana Fricila. “Konstitusi Dan Konstitusionalisme Di Indonesia” 2, no. 2 (2023): 1021–24.

Eta, Sunarto Lestari Yuni. “Judicial Review Sebagai Mekanisme Kontrol Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.” *INTEGRALISTIK* 35, no. 1 (2024): 1–10.

Habibani, Rhaysya Admami, dan Aldri Frinaldi. “Penerapan Prinsip Legalitas Dalam Kebijakan Administrasi Publik” 2 (2024): 296–303.

Hadi, Fikri. “NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA,” 2022, 170–88.

Hadjon, Philipus M. “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia.” *Surabaya: Bina Ilmu*, 1987, 38–41.

Ida, Lestari Sri Putu Luh Ni Widiarti Tirka Putu Ni Widnyani Sri Putu Ayu. “Kebijakan Penghapusan Piutang Macet UMKM Sebagai Implementasi Konsep Good Governance.” *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik* 13, no. 1 (2025): 1–20.

Indah, Oksilia Yulita, John Pieris, dan Wiwik S Widiarty. “PERAN ADMINISTRASI NEGARA DALAM PRESPEKTIF HUKUM DI INDONESIA” 7, no. 1 (2024): 60–71.

Lestari, Chery Rahayu, Azifa Balqis Az'zahra, Nadhiya Mozza Octavia, Fouziah Khenia Br S. Pandia, Ririn Wirdani, dan Said Hambali Takhir. "Analisis Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Pribadi Pengguna Terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) Pada Platform Digital" 4 (2026): 146–68. <https://doi.org/10.70308/adagium.v4i1.279>.

Lubis, Jeffrey Thomas, Elisatris Gultom, dan Somawijaya. "Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Yang Terindikasi Tindak Pidana Melalui Lembaga Kepailitan" 5 (2021): 250–61.

Masrida, dan Juliana Nasution. "Analisis Peranan Sistem Penagihan Piutang Negara Dalam Meningkatkan Efektifitas Kinerja Pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Keuangan Negara Medan," 2022, 41–48.

Napitupulu, Nicholas Firman Rafael, Sudaryat, dan Aam Suryamah. "TINJAUAN HUKUM POSITIF ATAS KEDUDUKAN NEGARA SEBAGAI PEMEGANG PNBP DALAM PROSES KEPAILITAN DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Medan) POSITIVE LEGAL REVIEW OF THE STATE'S POSITION AS A PNBP HOLDER IN BANKRUPTCY PROCEEDI" 6, no. 4 (2025): 1–14.

Natsif, Fadli Andi. "PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM INDONESIA" 19, no. 3 (2019): 148–58.

Poli, F P K, S S Pangemanan, dan R Lambey. "Analisis Sistem Penagihan Piutang Negara Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Manado." *Jurnal EMBA* 9, no. 240 (2021): 841–50.

- Pramono, Agus Joko. "The Role of the Audit Agency ( BPK ) in State Financial Management to Realize Good Governance" 16 (2020): 151–60.
- Priskap, Ridham. "Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia" 20, no. 1 (2020): 320–28. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i1.890>.
- Rahman, Lingga Abi, Jeora Nitysa Aprily, Muhammad Faishal Fadhlurrahman, Nurul, Rani Komalasari, dan Muhammad Luthfi Setiarno Putera. "Sistem Pengawasan Dan Perlindungan Hukum Dalam Tata Kelola Administrasi Negara," 2024, 1–3.
- Rokhman, Arief, dan Edi Pranoto. "MENEGAKKAN INTEGRITAS PEMERINTAHAN : Peran APIP Dan Pengawasan Terhadap Penyalahgunaan Wewenang," 2025.
- Roy, Alamsyah. "Upaya Administratif Pembebasan Jabatan Paska Berlakunya UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Studi Kasus Perkara Nomor 23/G/2020/PTUN-JKT)." *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 1, no. 2 (2021): 116–38.
- Rugian, Irene Angelita. "Prinsip Proporsionalitas Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Perbandingan Di Indonesia Dan Jerman)" 18 (2021).
- Saputra, Moh. Annand Ananda, Aryo Dwiarief Susetyo, dan Rachmat Hidayat. "Eksistensi BPK Dalam Melakukan Pengawasan Keuangan Negara" 2, no. September (2025).
- Silalahi, Wilma, dan Gladwin Wijaya. "Pengujian Perundang-Undangan Dalam

Sistem Hukum Indonesia : Analisis Legislative Review , Executive Review , Dan Judicial Review” 3, no. 1 (2025): 67–76.

Sofyan, Arif, dan Adellia putri Pramest. “Peran Pemerintah Terhadap Kasus Hak Asasi Manusia ( HAM) Masyarakat Papua Pegunungan,” no. 26 (2020): 85–93.

Spaltani, Bitu Gadsia. “Rekonsesi Perbuatan Pemerintah ( *Bestuurhandeling* ) Guna Mewujudkan Kepastian Hukum Yang Berkeadilan.” *KNAPHTN* 2, no. 1 (2024): 55–78.

Sudarsono. “Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah Undang-Undang Oleh Mahkamah Agung.” *MIMBAR YUSTITIA* 1, no. 2 (2017): 147–69.

Sukmawati, Ayu, dan Ira Setiawati. “Analisis Optimalisasi Sistem Penagihan Piutang Negara Di DJKN Jawa Tengah Dan D.I. Yogyakarta” 27, no. 2 (2025).  
<https://doi.org/10.37470/1.27.2.254>.

Syaifullahil, Maslul. “Pengujian Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindakan Faktual Di PTUN (Studi Putusan PTUN Nomor 2/P/PW/2017/PTUN.JBI).” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 3 (2022): 632–41.

Ulum, Mohammad Ihyaul, dan M Afif Hasbullah. “Akibat Hukum Putusan Mahkamah Agung No 23 P/HUM/2024 Terhadap Usia Calon Kepala Daerah Pada Pemilu Kepala Daerah 2024.” *Law Speci* 2, no. 1 (2025): 43–83.

Yadhy, Cahyady. “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Terhadap Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat

Pemerintah Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.” *Pajak Dan Keuangan Negara* 3, no. 2 (2021): 165–77.

———. “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Terhadap Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.” *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara* 3, no. 2 (2021): 165–77.

Yanti, Dewi, Junita Mawartina, Heti Sarlini, dan Wahjoe Pangestoeti. “Mekanisme Pengelolaan Utang Negara Dan Implikasinya Terhadap Perekonomian Nasional,” 2025.

Yonnawati. “PENEGAKAN HUKUM SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN PERIZINAN,” no. 1 (2022).

Zahra, Faradita Edsa, Komariah, dan Fifik Wiryani. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENANG LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN ATAS ADANYA PERLAWANAN PIHAK KETIGA (DERDEN VERZET)” 1, no. 2 (2021): 184–96.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Pemerintah Republik Indonesia. “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara” 1 (1960).

Presiden Republik Indonesia. “Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Pengurusan Piutang Negara Oleh Panitia Urusan Piutang Negara” 135355 (2022): 8936.

———. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara” 1 (2003): 1–40.

#### **PUTUSAN PENGADILAN**

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Putusan No. 40 P/HUM/2023,” 2023.

#### **LAPORAN**

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. “Laporan Keuangan Audited 2023,” 2023.

Kementerian Keuangan. “Reformasi Pengelolaan Kas Di Indonesia: Dari Administrasi Kas Menuju Pengelolaan Kas Secara Aktif,” 2014.

#### **SUMBER RESMI DAN MEDIA DARING**

Hidayat, Deni Atif. “Tindakan Keperdataan Dan/Atau Tindakan Layanan Publik; Upaya Pengembalian Hak Negara.” *Www.Djkn.Kemenkeu.Go.Id*, 2023.  
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16155/Tindakan-Keperdataan->

Sumarsono, S.H., M.H. “Wawancara, Kepala Kepala Subbidang Piutang Negara Pada Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Sekaligus Kepala Sekretariat PUPN Pusat DJKN Kementerian Keuangan Jakarta,” 2026.